

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alamsah, Nandang et al., *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Unpad Press, 2019.
- Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amrani, Hanafi. *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Amrullah, M. Arief. *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang* Jember: Bayumedia Publishing, 2004.
- Anand, Ghansam *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Globalisasi Kejahatan Bisnis* Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary Sixth Edition*, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fuady, Munir *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Garnasih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Launderin)*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Garnasih, Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan permasalahannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press 2017.

- H. Salim, *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan ke 1*, Sinar Grafika: Jakarta, 2018.
- H.R., Ridwan, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Prees, 2010
- Hakim, Lukman, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press, 2012.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hartanti & Nisya. *Prinsip-prinsip dasar profesi Notairs*. Jakarta: Cipayung, 2013
- Irman, Tubagus, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta: PT Gramedia, 2017.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Terjemahan Somardi Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 2003
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* Surabaya: Bina ilmu, 1987.
- M. Hadjon, Philipus & Tatiek Sri Djamati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Notorodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawalli, 1982.
- Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Raharjo, Satjipto Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000
- Reksodiputro, Mardjono. *Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Tindak Pidana Ekonomi (money laundering)*, Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1991/1992.
- Remi, Sutan Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Gratifi, 2007.
- Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penarapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2013.
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta: LaksBang, 2008.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Tim Peneliti Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, *Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, 2016.

Ujan, Andre Ata. *Filsafat Hukum-Membangun Hukum, Membela Keadilan*
Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Yustiavandana, Ivan, Arman Nefi & Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian
Uang Di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor
Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelindungan
Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017
tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun
2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan GOAML Bagi Profesi

Kode Etik Notaris

C. Artikel, Jurnal

Adolf, Jozan & Widhi Handoko & Muhammad Azhar, “Eksistensi
Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan,
NOTARIUS, Vol. 13, No. 1 (2020), 188.

Andario, Randy “Peranan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”, Vol. 4, No.4, (April 2016): 44.

Fransiska Novita Ekanora, “Tindak Pidana Pencucian Uang” Jurnal Hukum, Vol. 26, No. 2 (Agustus 2011) : 640-641.

I Gusti Agung Dhenita Sari & I Gusti Ngurah Wairocana & Made Gede Subha Karma Rese, “Kewenangan Notaris dan PPAT dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Milik”, Acta Comitatus, (2018), 49.

Khairul & Mahmud Siregar & Marlina, “Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mercatoria, Vol. 4, No. 1 (2011): 35.

Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran” *Pena Justisia*, Vol. 18, No. 1 (2019), 5.

Muhammad Rusdi, “Pencucian Uang dalam Transaksi Perdagangan,” *Jurnal IUS*, Vol. 4, No. 2 (Agustus 2016), 73.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan, Edisi Pertama, Jakarta, 2003, 3.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Potensi Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pada Profesi Berdasarkan Hasil Nasional Risk Assessment, Jakarta, September 2017. 12

Remy, Sutan Sjahdeini, “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor, Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 4 (2003): 7.

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

E. Wawancara

Notaris M. Wawancara dengan penulis, Kantor Notaris M di Kota Tangerang. 10 Juni 2021.

Wijaya, Alexander. Wawancara dengan penulis via online melalui Whatsapp, 12 Juni 2021.

F. On-Line Information Via Internet

Cahyo, “Dirjen AHU : GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU” (On-line), tersedia di WWW. http://m.beritahukum.com/detail_berita.php? (11 Desember 2018).

Ikatan Notaris Indonesia, “Pendaftaran Aplikasi GRIPS di PPATK” (On-line), tersedia di WWW. <https://ini.id/post/pendaftaran-aplikasi-grips-di-ppatk> (27 Agustus 2020).

Modul E-Learning PPATK tersedia di WWW:<https://elearning.ppatk.go.id/>

“Pengertian Perlindungan hukum menurut para ahli” di WWW: <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

“Perlindungan Hukum” tersedia di WWW :<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> (12 Maret 2021).

“Sambutan Kepala PPATK” (On-line), Tersedia di WWW. <https://www.ppatk.go.id/home/menu>. (31 Agustus 2020).